



WIKIPEDIA
Ensiklopedia Bebas

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (juga disingkat **Perpusnas**) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara. Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan No.11, Jakarta dan sebagian besar perkantornya di Jalan Salemba Raya No. 28A. Perpustakaan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pada tanggal 14 September 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas baru yang merupakan perpustakaan nasional tertinggi di dunia (126,3 meter) dengan 24 lantai, ditambah tiga lantai parkir bawah tanah (*basement*).^[3]

Gedung fasilitas layanan baru Perpustakaan Nasional dibuat dengan anggaran tahun jamak dari 2013-2016 sebesar Rp465,2 miliar.^[4] Per 2026, terdapat 9,9 juta naskah atau buku yang dapat dimanfaatkan dan diakses di Perpustakaan Nasional.^{[5][6]}

Sejarah

Sejarah Perpusnas bermula dengan didirikannya *Bataviaasch Genootschap* pada 24 April 1778. Lembaga ini adalah pelopor Perpusnas dan baru dibubarkan pada tahun 1950. Selama pendudukan Jepang (1942-5), perpustakaan ini dikenal sebagai Perpoestakaan Moesioem (Jepang: 博物館圖書部, romanized: *hakubutu-kan tosyobu*).^[7]

Awalnya, Perpustakaan Nasional RI merupakan salah satu perwujudan dari penerapan dan pengembangan sistem nasional perpustakaan, secara menyeluruh dan terpadu, sejak dicanangkan

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



6°10′54.340″S 106°49′37.045″E﻿ / ﻿

Lokasi Layanan Perpustakaan Umum, Gedung Plaza Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 dan Sekretariat Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta, Indonesia

Ruang lingkup Umum

Didirikan Mei 17, 1980

Koleksi

Barang yang dikoleksi 8.000.000+

Akses pengguna

Persyaratan akses Terbuka

Informasi lain

pendiriannya tanggal 17 Mei 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef. Ketika itu kedudukannya masih berada dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setingkat eselon II di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan badan ini merupakan hasil integrasi dari empat perpustakaan besar di Jakarta.

Anggaran	Rp721,69 miliar (2025) ^[1] Rp279,86 miliar (Efisiensi) Rp441,83 miliar (APBN 2025) ^[2]
Direktur	<u>Prof. Endang Aminudin Aziz</u> , <u>M.A., Ph.D.</u>
Situs web	<u>perpusnas.go.id</u> (<u>http://perpusnas.go.id/</u>)

Keempat perpustakaan tersebut, yang kesemuanya merupakan badan bawahan DitJen Kebudayaan, adalah:

- Perpustakaan Museum Nasional;
- Perpustakaan sejarah, politik dan sosial (SPS);
- Perpustakaan wilayah DKI Jakarta;
- Bidang Bibliografi dan Deposit, Pusat Pembinaan Perpustakaan;

Walau secara resmi Perpustakaan Nasional berdiri di pertengahan 1980, namun integrasi keseluruhan secara fisik baru dapat dilakukan pada Januari 1981. Sampai tahun 1987 Perpusnas masih berlokasi di tiga tempat terpisah, yaitu di Jl. Merdeka Barat 12 (Museum Nasional), Jl. Merdeka Selatan 11 (Perpustakaan SPS) dan Jl. Imam Bonjol 1 (Museum Naskah Proklamasi). Sebagai kepala Perpustakaan Nasional adalah ibu Mastini Hardjoprakoso, MLS, mantan kepala Perpustakaan Museum Nasional.

Atas prakarsa Almarhumah Ibu Tien Suharto, melalui Yayasan Harapan Kita yang dipimpinnya, Perpustakaan Nasional memperoleh sumbangan tanah seluas 16,000 m² lebih berikut gedung baru berlantai sembilan dan sebuah bangunan yang direnovasi. Lahan yang terletak di Jl. Salemba Raya 28A, Jakarta Pusat, merupakan lokasi Koning Willem III School (Kawedri), yakni sekolah HBS pertama di Indonesia ketika zaman kolonial. Bangunan sekolah inilah yang kemudian setelah direnovasi menjadi gedung utama yang digunakan untuk kantor pimpinan dan sekretariat. Gedung di sebelahnya yang berlantai sembilan berfungsi sebagai perpustakaan yang sebenarnya, di mana koleksi bahan pustaka tersimpan dan dilayankan untuk umum.

Dengan selesainya pengerjaan sebagian gedung baru maupun yang direnovasi di Jl. Salemba Raya 28A pada awal 1987, pimpinan dan staf dari tiga bidang (kecuali Bidang Koleksi) pindah ke lokasi tersebut. Gedung baru itu beserta segala perlengkapannya menyatukan semua kegiatan di bawah satu atap yang sebelumnya terpencar di beberapa tempat di Jakarta. Pada usia Perpusnas yang ke-9, secara resmi kompleks itu dibuka yang ditandai dengan penandatanganan sebuah prasasti marmer oleh Presiden dan Ibu Tien Suharto pada tanggal 11 Maret 1989.

Namun, sejalan dengan peresmian kompleks tersebut, sebetulnya ada peristiwa lain yang tidak kalah pentingnya. Sejarah mencatat bahwa lima hari sebelumnya, tepatnya tanggal 6 Maret 1989, telah ditandatangani sebuah keputusan monumental oleh Presiden RI melalui keputusan presiden Nomor 11 Tahun 1989 ini menetapkan Perpustakaan Nasional, setelah digabung dengan Pusat Pembinaan Perpustakaan (pimpinan Drs. Soekarman, MLS), menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada



Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta

Presiden. Kenaikan status kelembagaan ini juga berarti Perpustakaan Nasional dilepas dari yurisdiksi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, badan induknya yang telah membesarkannya sejak 1980. Ibu Mastini Hardjoprakoso masih dipercaya oleh Pemerintah untuk memimpin lembaga baru ini. Kenyataan ini sekaligus membuktikan komitmen Pemerintah di dalam menaikkan derajat perpustakaan dan pustakawan yang selama itu dirasakan selalu "dilupakan". Menurut catatan ketika penggabungan, jumlah koleksi berkisar di angka 600 ribu eksemplar, ditangani oleh sekitar 500 orang karyawan yang berlokasi di dua tempat terpisah, Jl. Salemba Raya 28A dan Jl. Merdeka Selatan 11. Saat ini (Desember 1999) jumlah koleksi diperkirakan 1,100,00 eks, dan jumlah karyawan 700 orang.

Dengan makin bertambahnya beban tugas dan sejalan dengan kiat Perpustakaan Nasional dalam menerapkan layanan prima kepada masyarakat, maka diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 tertanggal 29 Desember 1997. Keppres ini menyempurnakan susunan organisasi, tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional guna mengantisipasi era globalisasi informasi yang sudah kian mendekat. Di antara penyempurnaan tersebut adalah menciptakan jabatan deputy setingkat eselon IB dan menaikkan status Perpustakaan Nasional Provinsi (d.h. Perpustakaan Daerah) menjadi eselon II. Melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, Hernandono, MA, MLS, menjadi kepala Perpustakaan Nasional sejak Oktober 1998.

Perpustakaan Nasional RI kini menjadi perpustakaan yang berskala nasional dalam arti yang sesungguhnya, yaitu sebuah lembaga yang tidak hanya melayani anggota suatu perkumpulan ilmu pengetahuan tertentu, tetapi juga melayani anggota masyarakat dari semua lapisan dan golongan. Walau terbuka untuk umum, koleksinya bersifat tertutup dan tidak dipinjamkan untuk dibawa pulang. Layanan itu tidak terbatas hanya pada layanan untuk upaya pengembangan ilmu pengetahuan saja, melainkan pula dalam memenuhi kebutuhan bahan pustaka, khususnya bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, guna mencerdaskan kehidupan bangsa.^[8]

Fungsi

Berdasarkan ketentuan peraturan tahun 1980, maka tugas pokok Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan, serta pelestarian terbitan Indonesia sebagai khazanah kebudayaan serta menjamin pemeliharaan terbitan Indonesia. Untuk melaksanakan tugas tersebut, cakupan fungsi perpustakaan nasional adalah sebagai berikut :

- Mengumpulkan, mengatur, dan menyediakan hasil karya tulisan yang diterbitkan di Indonesia.
- Menjadi perpustakaan deposit dari terbitan Indonesia, baik terbitan pemerintah maupun swasta.
- Mengumpulkan, mengatur, dan menyediakan terbitan PBB dan negara lain, khususnya dari kawasan ASEAN.
- Menentukan standar dari sistem, organisasi, pelayanan, dan mutu koleksi perpustakaan di Indonesia.
- Menyenggarakan kursus tingkat nasional bagi pegawai perpustakaan.



Pelataran Perpustakaan di Jalan Medan Merdeka Selatan (2022).

- Memprakarsai kerjasama dengan lembaga di luar negeri, misalnya dalam pertukaran publikasi, peminjaman antar perpustakaan, penyusun bibliografi, dan pembuatan microfilm.
- Menyusun dan menerbitkan bibliografi nasional Indonesia (BNI).
- Dan menyusun serta menerbitkan katalog induk nasional (KIN).^[9]

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Nasional merupakan LPND yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan di ibukota negara.

Perpustakaan Nasional memiliki tugas sebagai berikut :

- Menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan;
- Melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan;
- Membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan
- Mengembangkan standar nasional perpustakaan.

Perpustakaan Nasional memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- Mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
- Mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa;
- Melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat; dan
- Mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri.

Fasilitas

Perpusnas tidak hanya menjadi tempat koleksi buku, tetapi juga memiliki berbagai fasilitas lainnya, seperti ruang teater, layanan audiovisual, area budaya baca, pusat data, layanan koleksi buku langka, serta menjadi lokasi kantor Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Fasilitas per lantai Perpusnas:^[10]

- Lantai 1 Lobi Utama, Cafe, dan Ruang Penyimpanan Tas/Loker
- Ruang Layanan Keanggotaan Perpustakaan,
- Lantai 2 Layanan Informasi dan Pengaduan, Ruang Media Center, dan Auditorium
- Layanan Penelusuran Informasi dan Fasilitas
- Lantai 3 Peneliti, Layanan Koleksi Buku Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
- Lantai 4 Ruang Pameran dan Kantin
- Lantai 5 Perkantoran
- Lantai 6 Pusat data dan Masjid
- Lantai 7 Layanan Anak, Layanan Lansia dan Difabel, Musholla
- Lantai 8 Layanan Audiovisual dan Mikrofilm
- Lantai 9 Layanan Naskah Nusantara



Taman dan pintu masuk Perpusnas

Lantai 10–11	Penyimpanan Koleksi <u>Monograf Tertutup</u>
Lantai 12–13	Ruang Baca Koleksi Monograf Tertutup, Musholla (Lt. 12)
Lantai 14	Layanan Koleksi Buku Langka
Lantai 15	Layanan Koleksi Rujukan dan Ilmu Perpustakaan
Lantai 16	Layanan Koleksi Foto, Peta dan Lukisan
Lantai 17–18	Kantor <u>Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia</u>
Lantai 19	Layanan <u>Multimedia</u> , Musholla
Lantai 20	Layanan Koleksi Berkala Mutakhir dan Mancanegara
Lantai 21	Layanan Koleksi <u>Monograf Terbuka</u> (klas 000-499)
Lantai 22	Layanan Koleksi Monograf Terbuka (klas 500-999)
Lantai 23	Layanan Koleksi Majalah Terjilid
Lantai 24	Layanan Koleksi Budaya Nusantara, <i>Executive Lounge</i> , dan Ruang Penerimaan Tamu Mancanegara



Direktori Perpustakaan Nasional RI

Galeri

Interior



Lobby pada lantai dasar



Area baca pada lantai 8



Pameran Naskah Nusantara

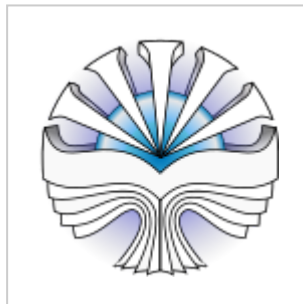


Ruang baca koleksi Naskah Nusantara



Galeri Kepresidenan di Perpustakaan Nasional, Jl Merdeka Selatan, Jakarta.

Logo



Logo lama Perpustakaan Nasional



Logo baru Perpustakaan Nasional (29 Desember 2014-sekarang)

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/304894/uu-no-62-tahun-2024>)
2. Lengkap! Ini Daftar Terbaru Kementerian dan Lembaga Terdampak Efisiensi Anggaran (<https://www.metrotvnews.com/read/k8oCVoLn-lengkap-ini-daftar-terbaru-kementerian-dan-lembaga-terdampak-efisiensi-anggaran>)
3. Kuwado, Fabian Januarius. Gatra, Sandro (ed.). "Jokowi Resmikan Gedung Perpustakaan Nasional Tertinggi di Dunia". *Kompas.com* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-09-18.

4. Burhani, Ruslan (ed.). "Perpustakaan Nasional usung bangunan efisiensi energi". *ANTARA News*. Diakses tanggal 2017-10-01.
5. "Perpusnas Dorong Penyediaan Bahan Perpustakaan Bermutu dan inklusif". *Perpusnas*. Diakses tanggal 2024-11-12.
6. Bondar -, Adin (2026-05-20). "Perpustakaan Memartabatkan Bangsa". *Kompas.id*. Diakses tanggal 2026-05-20.
7. Gowani, Katolo (2024-02-12). "NAMA DIRI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI PADA MASA JEPANG". *VISI PUSTAKA: Buletin Jaringan Informasi Antar Perpustakaan*. **25** (2): 133–144. doi:10.37014/visipustaka.v25i2.4652.
8. "SEJARAH PERPUSTAKAAN NASIONAL RI Sebuah Kajian". Diarsipkan dari asli tanggal 2016-06-13. Diakses tanggal 2016-09-14.
9. Sulistyono, Basuki *Periodisasi Perpustakaan Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994)hlm. 24
10. Hidayati, Nurul. "Perpustakaan Nasional Tertinggi Sedunia di Jakarta, Apa Saja Isinya?". *Kumparan*. Diakses tanggal 2017-09-18.

Lihat pula

- Perpustakaan Nasional
- Sistem Informasi Perpustakaan

Pranala luar

- **(Indonesia)** Laman resmi Perpustakaan Nasional (<http://perpusnas.go.id>)
-

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perpustakaan_Nasional_Republik_Indonesia&oldid=29325075"